

Kurikulum Satuan Pendidikan: Konsep, Tantangan, dan Evaluasi dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Salsabila Andhini Malika Putri¹ Nabilla Utari² Sela Pesta Kristina Simatupang³ Givaen Ray Simanjutak⁴ Muhammad Saputra⁵

¹⁻⁵Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: sabila.ads@gmail.com¹, nabilanabilaja451@gmail.com², simatupangsela36@gmail.com³, givaens@gmail.com⁴, saputraamuhammad6@gmail.com⁵

Korespondensi penulis: sabila.ads@gmail.com

Abstract. The School-Based Curriculum (KSP) is an operational curriculum developed by educational units to align learning objectives with the characteristics of students, local potentials, and the evolving needs of society. KSP provides schools with autonomy to develop curricula that are relevant to their local context, allowing for variations in the approach to learning. This article aims to discuss the basic concept of KSP, the challenges in its implementation, and its evaluation in the context of Indonesian education. The research method used is a literature review, analyzing theories and regulations related to KSP. The results show that KSP plays a strategic role in providing schools with the flexibility to develop curricula that meet the needs of the region and students. However, the implementation of KSP still faces various challenges, such as limited teacher competencies, insufficient understanding of curriculum principles, and weak evaluation and supervision of curriculum implementation. To address these challenges, the evaluation of KSP implementation needs to be strengthened by improving teachers' competencies, developing relevant learning materials, and enhancing ongoing curriculum supervision. By doing so, KSP can be optimized to achieve better educational outcomes in Indonesia.

Keywords: Curriculum Implementation; Education Policy; Educational Evaluation; School Autonomy; School-Based Curriculum

Abstrak. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh satuan pendidikan untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, serta kebutuhan perkembangan zaman. KSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal, memungkinkan adanya variasi dalam pendekatan pembelajaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep dasar KSP, tantangan implementasinya, serta evaluasi pelaksanaannya dalam konteks pendidikan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menganalisis teori dan regulasi terkait KSP. Hasil kajian menunjukkan bahwa KSP memiliki peran strategis dalam memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peserta didik. Namun, implementasi KSP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip kurikulum, serta lemahnya evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan kurikulum. Untuk mengatasi tantangan ini, evaluasi pelaksanaan KSP perlu diperkuat dengan meningkatkan kompetensi pendidik, mengembangkan perangkat pembelajaran yang relevan, serta memperkuat pengawasan kurikulum secara berkelanjutan. Dengan demikian, KSP dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

Kata kunci: Evaluasi Pendidikan; Implementasi Kurikulum; Kebijakan Pendidikan; Kurikulum Satuan Pendidikan; Otonomi Sekolah

A. LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah instrumen utama dalam sistem pendidikan karena menetapkan arah, konten, dan metode pembelajaran. Di Indonesia, kurikulum mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu — mulai dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, KBK (2004), KTSP (2006), hingga Kurikulum 2013 dan yang paling baru adalah Kurikulum Merdeka.

Perubahan ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menyesuaikan dengan tuntutan global, karakter peserta didik, dan konteks lokal sekolah.

Salah satu aspek penting dari reformasi kurikulum di Indonesia adalah pemberian kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional mereka sendiri, yang dikenal sebagai Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) atau dalam Kurikulum Merdeka sering disebut KOSP (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan). Dengan KSP, sekolah dapat mengadaptasi kurikulum nasional agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik, potensi lingkungan, serta kondisi sosial dan budaya lokal. Fleksibilitas ini merupakan bentuk desentralisasi kurikulum yang sangat strategis.

Namun, meskipun KSP menawarkan keuntungan besar dalam hal kontekstualisasi dan otonomi, implementasinya di lapangan tidak selalu mulus. Beberapa studi literatur dan penelitian empiris menunjukkan kendala signifikan. Misalnya, penelitian oleh (Sucipto et al., 2024) menyebut beberapa tantangan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat dasar, seperti keterbatasan sarana prasarana, kesiapan guru, dan ketimpangan kebijakan. Selain itu, kajian literatur oleh (Syafriani et al., 2025) menyoroti bahwa meskipun Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas perencanaan, banyak satuan pendidikan masih menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan otonomi ini karena kurangnya pendampingan dan monitoring.

Di sisi guru, studi oleh (Hartawati & Karim, 2024) menemukan bahwa guru SMP menghadapi tantangan besar dalam memahami dan menerapkan kurikulum baru, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Kemudian, penelitian di SDN Patih juga mengungkap bahwa keterbatasan sarana-prasarana dan pemahaman guru menjadi hambatan signifikan dalam merencanakan pembelajaran yang fleksibel sesuai KSP/Kurikulum Merdeka (Afifyanti et al., 2025).

Berdasarkan gambaran tersebut, meskipun KSP sangat potensial meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan, ada masalah-masalah mendasar yang harus diatasi agar kurikulum operasional ini bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi konseptual dan praktis terkait implementasi KSP: memahami sejauh mana konsepnya diadopsi, tantangan yang dihadapi sekolah/guru, serta bagaimana evaluasinya bisa dilakukan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi “dokumen formal”, tetapi benar-benar berdampak positif pada proses pembelajaran.

Artikel ini bertujuan untuk menggali tiga hal utama: (1) konsep dasar KSP dalam konteks pendidikan Indonesia, (2) tantangan-tantangan implementasinya berdasarkan literatur, dan (3) rekomendasi evaluasi dan strategi perbaikan agar pelaksanaan KSP lebih efektif dan berkelanjutan.

B. KAJIAN TEORITIS

Berikut beberapa teori dan konsep utama yang relevan dengan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) / Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), serta komponen dan prinsip-prinsipnya:

A. Teori Kurikulum dan Konsep Kurikulum Satuan Pendidikan

Kurikulum merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan. Menurut Mulyasa (Collins et al., 2021), kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dan lembaga dalam mengarahkan proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Pandangan ini menegaskan bahwa kurikulum tidak hanya sebatas dokumen, tetapi juga mencakup implementasi dan pengalaman belajar peserta didik di sekolah.

Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dalam konteks saat ini dikenal sebagai Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) merupakan kurikulum yang disusun secara mandiri oleh sekolah berdasarkan kerangka kurikulum nasional. KSP memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, budaya lokal, serta sumber daya sekolah. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan benar-benar relevan dengan kebutuhan pembelajar dan lingkungan sekitar (Collins et al., 2021).

Fungsi utama KSP/KOSP antara lain memberikan otonomi kepada sekolah untuk merancang proses pembelajaran sesuai konteksnya. Selain itu, kurikulum operasional membantu penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, modul ajar, dan RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di sekolah. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, KOSP juga mengintegrasikan nilai-nilai *Profil Pelajar Pancasila* dalam setiap komponennya, sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kompetensi akademik tetapi juga pembentukan karakter (Kurka, 2022; Mohsin, 2023).

B. Komponen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)

Menurut panduan resmi dari Kementerian Pendidikan, terdapat beberapa komponen utama dalam KOSP yang wajib disusun oleh setiap satuan pendidikan. Komponen pertama adalah Karakteristik Satuan Pendidikan, yang memuat analisis kondisi sekolah, karakter peserta didik, budaya lokal, sarana prasarana, serta lingkungan sosial budaya. Analisis ini menjadi dasar penting untuk menyusun kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan sekolah (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022; kemendikbud, 2022).

Komponen kedua adalah Visi, Misi, dan Tujuan Satuan Pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai pendidikan dan karakteristik sekolah. Tujuan pendidikan harus sejalan dengan pengembangan *Profil Pelajar Pancasila* dan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Komponen ketiga adalah Pengorganisasian Pembelajaran, yang menjelaskan bagaimana sekolah mengatur struktur pembelajaran, alokasi waktu, bentuk pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, projek, dan ekstrakurikuler. Pada Kurikulum Merdeka, pengorganisasian pembelajaran juga mengatur pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Komponen keempat adalah Perencanaan Pembelajaran, yaitu penyusunan modul ajar, perangkat asesmen, serta rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dokumen ini harus fleksibel dan dapat dikembangkan oleh pendidik. Komponen kelima adalah Pendampingan, Evaluasi, dan Pengembangan Profesional, yang memastikan bahwa kurikulum di sekolah terus diperbarui melalui supervisi berkala, refleksi, dan pengembangan kompetensi guru.

C. Prinsip Penyusunan Kurikulum Operasional (KOSP)

Penyusunan KOSP harus berpedoman pada beberapa prinsip dasar. Prinsip pertama adalah berpusat pada peserta didik, yang berarti kurikulum harus mengakomodasi kebutuhan, potensi, minat, dan latar belakang siswa yang beragam. Prinsip kedua adalah kontekstual, yaitu kurikulum disusun sesuai dengan konteks dan kondisi lingkungan sekolah, termasuk budaya masyarakat sekitar.

Prinsip ketiga adalah esensial, yaitu kurikulum harus memuat elemen penting secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan sekolah. Prinsip keempat adalah akuntabel, yang mengharuskan kurikulum disusun berdasarkan data dan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Prinsip kelima adalah partisipatif, yaitu penyusunan kurikulum melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, komite sekolah, serta pihak terkait lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah.

D. Aspek Evaluasi Kurikulum Satuan Pendidikan

Evaluasi kurikulum dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Pertama, evaluasi dokumen kurikulum dilakukan dengan meninjau kelengkapan dan kesesuaian dokumen seperti visi-misi, struktur kurikulum, modul ajar, dan RPP. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah kurikulum sudah sesuai prinsip pedagogis dan karakteristik sekolah.

Kedua, evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan mengamati implementasi kurikulum oleh guru di kelas, termasuk metode yang digunakan, strategi pembelajaran, serta manajemen waktu.

Ketiga, evaluasi hasil belajar bertujuan menilai pencapaian kompetensi siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pada Kurikulum Merdeka, hasil belajar juga dikaitkan dengan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Keempat, pengembangan profesional berkelanjutan adalah langkah lanjutan dari evaluasi, dalam bentuk pelatihan, refleksi, dan revisi dokumen kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan.

E. Hubungan Teoritis dengan Pendidikan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

KOSP secara langsung mendukung penguatan pendidikan karakter melalui integrasi *Profil Pelajar Pancasila* ke dalam tujuan, struktur, dan pelaksanaan pembelajaran. Sekolah wajib merumuskan profil lulusan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi karakter siswa.

Selain itu, pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning) menjadi strategi utama dalam menanamkan karakter dan kompetensi holistik. Melalui projek, siswa belajar mengembangkan kreativitas, gotong royong, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Asesmen autentik juga menekankan penilaian berbasis proses dan produk nyata, seperti proyek, presentasi, jurnal refleksi, atau portofolio, sehingga lebih mampu menggambarkan kemampuan dan perkembangan karakter siswa secara komprehensif (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022).

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan karena bertujuan untuk menelaah konsep, tantangan, dan evaluasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) berdasarkan teori, regulasi, dan penelitian terdahulu. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi. Metode ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kurikulum yang juga menggunakan pendekatan kepustakaan (Indonesia et al., 2020).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi regulasi pendidikan, khususnya dokumen resmi pemerintah terkait penyusunan dan implementasi kurikulum satuan pendidikan; literatur akademik seperti buku-buku teori kurikulum dan artikel jurnal nasional maupun internasional; serta laporan kebijakan pendidikan yang relevan dengan KSP maupun evaluasi kurikulum operasional. Semua sumber ini dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen

kebijakan, artikel jurnal, buku, dan laporan resmi, baik dari perpustakaan digital maupun repositori akademik seperti Google Scholar dan basis data institusi pendidikan.

Proses analisis data dilakukan dengan analisis dokumen (*documentary analysis*), yaitu metode yang menelaah dan mengevaluasi isi dokumen secara sistematis. Analisis dilakukan dengan mengkodekan informasi ke dalam tema-tema seperti konsep KSP, tantangan pelaksanaan, serta hasil evaluasi implementasi. Teknik analisis ini mengacu pada penjelasan tentang *documentary analysis* yang menekankan pentingnya membandingkan isi dokumen dalam kerangka teoretis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Untuk menjaga validitas dan keandalan penelitian, peneliti menggunakan triangulasi literatur dengan melibatkan berbagai sumber data sehingga analisis tidak berpihak pada satu jenis sumber saja. Selain itu, seluruh dokumen dicatat secara rinci untuk membangun *audit trail* yang memungkinkan proses penelitian direplikasi atau diaudit ulang oleh peneliti lain. Peneliti juga melakukan refleksi kritis terhadap teori-teori yang digunakan serta membandingkannya dengan temuan penelitian sebelumnya guna menghindari bias interpretatif.

Penelitian ini memiliki batasan tertentu. Karena menggunakan metode studi pustaka, penelitian tidak melibatkan data lapangan seperti wawancara guru maupun observasi kelas, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual. Selain itu, ketersediaan literatur terkait KSP/KOSP yang masih terbatas dapat memengaruhi kedalaman analisis. Interpretasi hasil analisis dokumen juga sangat bergantung pada kualitas serta relevansi literatur yang dapat diakses.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) merupakan bentuk otonomi kurikulum yang memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik, potensi daerah, dan kebutuhan pembelajaran. Dalam implementasinya, KSP tidak hanya menuntut fleksibilitas, tetapi juga menekankan pentingnya adaptasi sekolah terhadap dinamika sosial dan perkembangan pendidikan modern. Namun, sejauh kajian pustaka yang dianalisis, implementasi KSP di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarsekolah.

Penelitian oleh (Sulastini et al., 2023) menunjukkan bahwa pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap penyusunan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen.

Studi ini dilakukan di Ciranjang, Cianjur, dan menemukan bahwa pelatihan terstruktur membantu guru menyusun KOSP secara lebih sistematis sehingga implementasi kurikulum menjadi lebih terarah. Temuan ini menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan KSP adalah peningkatan kapasitas guru melalui pendampingan profesional.

Penelitian lain oleh (Lena et al., 2023) mengungkapkan bahwa kesiapan guru sekolah dasar dalam menerapkan Kurikulum Merdeka (yang menjadi payung dari KSP/KOSP) masih tergolong sedang hingga rendah. Banyak guru mengaku belum sepenuhnya memahami capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran (ATP), dan modul ajar. Tantangan terbesar ditemukan pada sekolah yang minim akses pelatihan dan bahan referensi. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas guru masih menjadi faktor penentu utama dalam efektivitas implementasi KSP.

Selain aspek kompetensi guru, penelitian (Sumarsih et al., 2022) menemukan bahwa beberapa sekolah penggerak SD mampu mengimplementasikan kurikulum operasional secara efektif karena memiliki dukungan kuat dari kepala sekolah serta budaya kolaborasi yang baik. Guru secara rutin berdiskusi untuk menyusun modul ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan menyesuaikan perangkat ajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah dan budaya kerja kolaboratif sangat berperan dalam keberhasilan KSP.

Di sisi lain, penelitian (Aprilia et al., 2024) pada SDN 187/I Teratai menemukan bahwa implementasi KSP sering terhambat oleh keterbatasan fasilitas, terutama akses teknologi dan sumber belajar. Guru kesulitan menyusun modul ajar yang inovatif karena referensi yang terbatas dan kurangnya pelatihan. Sekolah dengan fasilitas minim cenderung kembali menerapkan pembelajaran tradisional karena tidak mampu memenuhi tuntutan penyusunan kurikulum operasional secara mandiri. Contoh ini menunjukkan bahwa kesenjangan sumber daya menjadi tantangan nyata dalam penerapan KSP.

Sementara itu, penelitian (Alfani et al., 2023) mengenai pengembangan Kurikulum Operasional Pascapandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sekolah yang rutin melakukan evaluasi dan revisi KOSP setiap semester memiliki tingkat adaptasi pembelajaran yang lebih baik. Guru melakukan peninjauan ulang terhadap capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, serta penggunaan asesmen, sehingga kurikulum benar-benar digunakan sebagai dokumen hidup (*living document*). Temuan ini menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan KSP tidak hanya bersifat administratif.

Secara keseluruhan, adanya contoh nyata dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KSP tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi lebih pada kesiapan sekolah dalam memanfaatkan otonomi yang diberikan. Faktor kompetensi guru, sarana prasarana, dukungan kepemimpinan sekolah, serta budaya kolaboratif terbukti

berpengaruh besar. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas KSP, sekolah perlu memperkuat kapasitas guru melalui pelatihan, memperluas akses sumber belajar, dan membangun kerja sama yang kuat antar pemangku kepentingan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) memiliki peran penting dalam memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan, kontekstual, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam menyusun dan memahami komponen kurikulum operasional, seperti capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar, menjadi faktor utama penentu keberhasilan KSP. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana, akses pelatihan profesional, serta dukungan kepemimpinan sekolah turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Di sisi lain, sekolah-sekolah yang memiliki budaya kolaboratif, melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dokumen kurikulum, dan memperoleh pendampingan intensif terbukti mampu mengimplementasikan KSP dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan KSP tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan internal sekolah dalam mengoptimalkan otonomi yang diberikan. Secara keseluruhan, KSP memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun memerlukan dukungan sistematis dari seluruh pemangku kepentingan.

Peningkatan kualitas implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) memerlukan penguatan pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam penyusunan KOSP, modul ajar, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan kurikulum secara mandiri. Selain itu, kepala sekolah perlu menunjukkan kepemimpinan yang suportif dengan memfasilitasi kolaborasi guru serta menyediakan ruang diskusi rutin agar pelaksanaan KSP berjalan optimal. Pemerintah dan sekolah juga harus memastikan tersedianya akses sumber belajar dan teknologi, terutama bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan menyusun dan melaksanakan kurikulum operasional. Di sisi lain, budaya kolaboratif antar-guru harus diperkuat agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berlangsung efektif dan berkesinambungan. Selanjutnya, KSP hendaknya diperlakukan sebagai dokumen hidup (*living document*) yang selalu diperbarui melalui evaluasi berkala sesuai kebutuhan peserta didik dan dinamika lingkungan sekolah, sehingga kualitas implementasi kurikulum dapat terjaga dan terus meningkat.

DAFTAR REFERENSI

Afiyanti, I. N., Sabilia, L., Abdi, M. S., Ilami, N., & Pratiwi, D. A. (2025). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Patih Selera: Kajian tentang pemahaman guru dan kesiapan sarana-prasarana. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 503-515. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.888>

Alfani, M. F., Sukiman, S., & Sholikin, S. (2023). Pengembangan kurikulum operasional sekolah jenjang MI/SD pasca Covid-19. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 8(1), 135-146. <https://doi.org/10.14421/jpm.2023.135-146>

Aprilia, R. N., Fitriani, D., Sari, S., Fitri, D. A., Khoirunnisa, K., & Rosmalinda, D. (2024). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 187/I Teratai. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 751-759. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2676>

Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. (2022). *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Bab II Tinjauan Pustaka.

Hartawati, F., & Karim, M. (2024). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 14(1), 185-190. <https://doi.org/10.23969/literasi.v14i1>

Indonesia, D., Negara, P. K., & Kewarganegaraan, P. (2020). Analisis perkembangan kurikulum PPKn dari Rentjana Pelajaran 1947. *PKn Progresif*, 15(1), 63-82. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>

Kemendikbud. (2022). *Komponen Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan Asinkron*.

Kurka. (2022). G. 4 Komponen Kurikulum Operasional Kurikulum Merdeka. 30 Agustus. <https://madrasahdigital.net/komponen-kurikulum-operasional-kurikulum-merdeka/>

Lena, M. S., Iraqi, H. S., Arrahmi, F., & Adabiah, R. (2023). Kesiapan guru sekolah dasar dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2010), 7493-7498.

Mohsin. (2023). Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. *Sman15tanjabbarat.sch.id*. <https://sman15tanjabbarat.sch.id/read/64/komponen-kurikulum-operasional-satuan-pendidikan?>

Sucipto, S., Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2024). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Systematic literature review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.84353>

Sulastini, R., Irnawati, R., Agustini, T., & Stefanie, S. (2023). Pendampingan penyusunan dokumen rencana pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen dalam KOSP Kurikulum Merdeka sekolah dasar di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. *Journal of Education Research*, 4(4), 2228-2235. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.604>

Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>

Syafriani, D., Dwi Purnama Dawolo, B., Andriani Butar Butar, L., Batubara, N., & Silitonga, S. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Indonesia: Kajian literatur. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 83-91. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.386>